

Konstruksi bahasa politik dalam memperkokoh hegemoni kekuasaan : suatu analisis wacana kritis menjelang SU MPR 1998 hingga munculnya era reformasi medio Mei 1998

Laode Harjudin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=92356&lokasi=lokal>

Abstrak

Upaya memahami realitas kekuasaan telah melahirkan beragam konsep yang cukup memperkaya khasanah teori politik. Teori dan analisis politik pun berkembang bersamaan dengan perubahan pola dan realitas kekuasaan. Sebagian besar analisis lebih banyak memahami fenomena kekuasaan pada level permukaan dari struktur kekuasaan. Padahal pemapanan dan perubahan kekuasaan tidak terbatas pada upaya kontroi mekanisme teknis-struktural, tetapi tak kalah hebatnya pengendalian terhadap wacana sosial dan kultural yang mewujud dalam konstruksi bahasa yang ditanamkan secara ideologis.

Berangkat dan pemahaman di atas, Studi ini berusaha menjelaskan proses pengokohan hegemoni kekuasaan melalui konstruksi dan pengendalian wacana politik pada masa Orde Baru dengan memilih rentang waktu menjelang SU MPR 1998 hingga munculnya Era Reformasi 1998. Karena itu, Studi ini berupaya menjelaskan 'bagaimana proses konstruksi bahasa politik dalam memperkokoh hegemoni kekuasaan?

Sedangkan manfaat penelitian : secara teoritis, penelitian ini, diharapkan mampu memperkaya keberagaman wawasan tentang kajian politik dari perspektif analisis wacana kritis (critical discourse analysis), dan secara praktis dapat memberikan kontribusi terhadap usaha memahami mekanisme penguasa dalam memperkokoh hegemoninya.

Analisis kajian ini lebih banyak menekankan perspektif interpretatif dalam paradigma kritik. Perspektif yang cukup memberi nuansa kritis adalah analisis wacana kritis yang dikembangkan Norman Fairclough. Perspektif ini berusaha menemukan makna dari suatu teks dan berusaha menjelaskan proses produksi wacana dalam konteks sosial. Interpretasi dan makna teks dan, lebih luas, wacana menghendaki kehadiran hermeneutik yang dielaborasi oleh Gadamer dan Heidegger, sebagai sebuah metode penafsiran. Sinergi dua perspektif tersebut bisa mampu mengungkapkan makna dari permainan wacana yang implisit. Sehingga maksud-maksud terselubung pun terdeteksi. Bahasa sebagai unit analisa dilihat dari kaca mata genealogis, Foucault. Dari sini, bahasa tidak dilihat sekedar sebagai perkara gramatik, tetapi lebih merupakan ajang perlarungan kekuasaan. Ruang (space) tempat konflik berbagai kepentingan politik, kekuasaan, dan hegemoni tergelar.

Pada talaran yang lebih konseptual, studi ini menemukan wujudnya pada

pemikiran Antonio Gramsci Dalam memandang kekuasaan, Gramsci lebih mengedepankan penekanan kultural-ideologis yang sekaligus, konsep ini, menandai perpisahannya dengan konsep Manda yang economic determinant Gramsci mengembangkan istilah hegemoni yang berarti konstruksi ideologi oleh pihak yang dominan untuk mencapai konsensus dari pihak yang dikuasai melalui penggunaan kepemimpinan moral, intelektual dan politik yang menjelmakan diri dalam bentuk monopoli teks dan tafsirnya. Proses ke arah pencapaian dan restrukturisasi hegemoni ditempuh dengan 'teknologisasi wacana'. Proses ini merupakan bagian dari strategi dominasi sosial kelompok yang dominan untuk memantapkan eksistensinya secara hegemonik lewat kontrol praktek wacana (discursive practice).

Di masa kekuasaan rezim Orde Baru berlangsung, proses-proses seperti dijelaskan itu telah mengorek penengkuhan selama lebih kurang 32 tahun. Wacana politik berhasil dikontrol dalam koridor negara Pancasila dengan mempropagandakan kata "pembangunan" dan "stabilitas". Di atas dan dengan kedua kata inilah berlangsung pengoperasian ideologi yang menyamar dalam kemasan-kemasan wacana politik. Setiap bahasa politik yang mawujud dalam pernyataan-pernyataan elite di tingkat negara selalu mencerminkan bias pro hegemoni negara. Argumen "untuk kepentingan bersama" tidak lebih dari sebuah kalimat yang sarat muatan ideologi. Tujuannya untuk merangkul keterlibatan banyak orang agar kekuasaan tetap legitimate. Cara itu merupakan penggiringan kesadaran sehingga masyarakat, secara perlahan-lahan terhegemoni, dan kekuasaan tetap lestari dalam genggam tangan penguasa. Kecuali ketika rakyat terbangun dari ketidaksadaran dan mulai menggugat berbagai hal, maka bangunan kekuasaan mengalami keruntuhan. Tamatlah Orde Baru.